

Judul : Senayan apresiasi kebijakan pemerintah
Tanggal : Minggu, 12 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Senayan Apresiasi Kebijakan Pemerintah

PARLEMEN memastikan ketahanan energi nasional, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), berada dalam kondisi aman dan terkendali di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puteri Anetta Komarudin menyatakan, Pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi. Termasuk memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun.

"Tentunya, kebijakan ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, terutama untuk menjaga daya beli. Terlebih, kita juga memiliki ruang fiskal yang cukup," kata Puteri, kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mampu menahan risiko kenaikan harga minyak mentah dunia hingga 100 dolar AS per barel.

Meski demikian, Pemerintah diingatkan tetap menjaga disiplin fiskal. Khususnya dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puteri juga menekankan pentingnya koordinasi antar-otoritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, terutama di tengah tekanan global yang meningkat. Salah satu perhatian adalah pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

"Salah satu yang perlu menjadi perhatian kami adalah pergerakan nilai tukar Rupiah yang mengalami tekanan dalam beberapa hari terakhir. Karenanya, Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat langkah-langkah intervensi untuk menjaga stabilitas kurs Rupiah," jelasnya.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didorong untuk mempercepat reformasi pasar modal guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dari paparan yang kami terima, kondisi BBM kita aman. *Lifting* migas juga masih berada dalam jalur target dan dari sisi hilir, pengawasan distribusi berjalan baik tanpa kendala berarti. Jika terdapat penyelewengan, telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak terkait," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kinerja *lifting* minyak dan gas bumi nasional masih sesuai target APBN. Sementara pengawasan distribusi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berjalan optimal.

Komisi XII DPR, lanjut Bambang, akan terus mendorong penguatan pengawasan serta memastikan kebijakan di sektor energi berjalan efektif guna menjaga stabilitas pasokan nasional. ■ DIR